

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Konstelasi kehidupan di era kosmopolitan dewasa ini semakin kompleks dan menggejala, banyak tantangan yang dihadapi akibat arus globalisasi. Kultur dan tradisi masyarakat tentu saja dengan serta merta mudah terbawa arus globalisasi. Identitas diri masyarakat bisa punah jika tidak mampu harmoni dengan dunia global. Hal ini mengisyaratkan gambaran dunia heterogen yang terasa semakin sempit. Sebagaimana dikemukakan oleh McLuhan bahwa di era globalisasi dewasa ini semua tidak bisa lepas dari kehidupan global, atau yang Alvin Tofler sebut bahwa dunia telah menjadi kampung besar (*global village*) (Mahfud, 2006: 193). Kemajuan di bidang teknologi informatika berdampak sangat luas, dampaknya bukan saja pada bidang sosial, politik, budaya, tapi juga pendidikan, dan agama.

Gesekan dan perbedaan dalam berbagai ranah merupakan pemantik terjadinya konflik dan

pertikaian di masyarakat. Contoh realitas ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena sebagaimana Ali Maksum menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk dan pluralis. Kemajemukan ini bisa menjadi kekuatan, namun juga bias menjadi boomerang. Kemajemukan bangsa Indonesia ini menjadi kekuatan jika dilihat dari dua perspektif, yaitu horizontal dan vertikal (Mahfud, 2006: 176). Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, budaya dan lain – lain. Dari segi agama, bangsa Indonesia memiliki kemajemukan, ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu dan ratusan agama kepercayaan lokal. Dari segi kultur, terdapat perbedaan adat istiadat antara satu daerah dengan daerah lain yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Begitu pula dengan etnis, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku yang jumlahnya mencapai ribuan yang tersebar pada 17.667 pulau besar dan kecil di Indonesia. Semuanya adalah kekayaan Indonesia dalam kemajemukan. Namun, diketahui pula,

Indonesia memiliki kekayaan dan khazanah kehidupan masyarakat dengan heterogenitasnya yang sangat tinggi, tentu saja kemajemukan ini bisa pada potensi konflik ketegangan sosial yang tidak mudah dipulihkan ke kondisi semula, dan ini menjadi boomerang jika tidak ada arahan ataupun visi misi yang sama dalam berbangsa dan bernegara.

Indonesia memandang keberagaman ini sebagai suatu kesatuan Indonesia, hal ini dibumisasikan dengan koridor Pancasila dan UU. Dalam perjalanan implementasinya, usaha dari pemerintah ternyata kurang diimbangi dengan fakta realitas sosial bangsa yang heterogen, kekerasan komunal, etnis dan bernuansa agama tersebut semakin menggejala dari tahun ke tahun dengan berkembangnya kompleksitas masalah kebangsaan yang dihadapi Indonesia modern. Adapun barometer konflik yang sering terjadi menurut Karuna *Center for Peacebuilding* (<http://www.karunacenter.org>) adalah: Penolakan atas status dan akses yang sama terhadap kelompok lain (*restriction*) berupa organisasi – organisasi militan, Pandangan dan sikap yang menganggap kelompok lain lebih rendah (*dehumanization*) dan Pengabaian hak-hak sipil,

politik, dan ekonomi (*opression*) dari paham radikal, dan aksi – aksi radikalisme seperti Penyerangan dan melakukan upaya pembunuhan (*act of agression*), Pengorganisasian pembunuhan massal (*mass-violence*) atau terorisme, dan dikhawatirkan hingga pembasmian atas dasar identitas (*genocide*) yang sekarang ini menggejala di Suriah dan Perbatasan Turki dan Irak.

Hal yang terjadi diatas secara tidak langsung dan tidak serta merta tidak bisa lepas dari pola pemahaman agama dan beragama yang diperoleh dan yang diyakini si pelaku. Memang,memahami fenomena agama secara sosiologis mempunyai dualisme perspektif (dua topeng dalam satu wajah).Pada satu perspektif, agama dipandang sebagai ajaran *profertic* (sifat kenabian), ajaran ketuhanan, ajaran kasih sayang, saling menghormati antar manusia, saling menolong, kebersamaan dalam menyelematkan kehidupan, memelihara bumi, lingkungan dan segala kekayaan alam untuk kemaslahatan manusia di muka bumi. Di perspektif yang lain agama dipandang sebagai potret instrumen kepentingan politik dan simbol, salah satu contohnya adalah syiar-dakwah (K Omaruddin Hidayat, 2012) dalam rangka hendak

menundukkan dan melawan orang lain agar mereka mengikuti ajaran aliran yang diyakini (sebagai paham ajaran kebenaran tentang ketuhanan yang paling benar diantara lain-lainnya). Terlebih lagi dalam fakta transformasi ajaran agama yang dilaksanakan pada masyarakat Indonesia cenderung kurang menekankan pentingnya menghargai perbedaan, pendidikan sering dijadikan mediasi untuk menekankan keseragaman (iis Arifudin: 229). dan bahkan ada anomali-anomali bahwa pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam menjerumuskan kearah tindakan negatif, seperti: etnosentrisme, prejudis, stereotip, permusuhan, intoleransi, pelanggaran HAM, diskriminasi, marginalisasi, bias gender, korupsi, terorisme, anarkisme dan tindakan destruktif lainnya.

Merespon kebutuhan tersebut dan melihat realitas beberapa tahun terakhir yang semakin menggejala berkenaan dengan konflik (bernuansa agama, kelompok ataupun perkumpulan gerakan), pemerintah sebenarnya telah merancang serangkaian upaya, mekanisme dan muatan pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, negara dan dunia pada

umumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Oliva bahwa perangkat pendidikan merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat (Olivia, 1997:60) dengan mengkaji system pendidikan multicultural yang dikembangkan di perguruan tinggi akan didapat sebuah gerakan pembaharuan dan inovasi pendidikan yang diorientasikan dalam rangka membangun manusia Indonesia yang memiliki karakter. PTAI sebagai institusi pendidikan Islam memungkinkan untuk melakukan proses penumbuhkembangan kehidupan masyarakat multicultural.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan (policy) dan praktik (practice) pendidikan multikultural di Perguruan Tinggi Agama Islam turut mampu menghantarkan dan memberikan kontribusi memecahkan masalah ekstern maupun intern dari titik lemahnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini urgen dilaksanakan, yakni sebagai mediasi rotasi fungsional kritis, transformatif dan legitimasi. Pendidikan Multikultural di PTAI akan membuka mata masyarakat untuk beragama yang matang jauh dari berperilaku eksklusif, primordialisme, ataupun literalisme yang destruktif. Penelitian ini juga

menjadi nilai legitimatif dalam koreksi/pemecahan masalah berkenaan hambatan implementasi pendidikan multikultural di Kalimantan Selatan dan juga tentunya memberikan nuansa transformatif bagi calon guru MI dalam mentransferkan ilmu, nilai dan metodologi di tingkat Madrasah Ibtidaiyah nantinya sehingga pada ujung hakikat tujuannya menciptakan peradaban Indonesia yang sesuai dengan falsafah Indonesia. Didasari pada hal tersebut maka peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Pendidikan Multikultural di PTAI se Kalimantan Selatan”**. Konstelasi kehidupan di era kosmopolitan dewasa ini semakin kompleks dan menggejala, banyak tantangan yang dihadapi akibat arus globalisasi. Kultur dan tradisi masyarakat tentu saja dengan serta merta mudah terbawa arus globalisasi. Identitas diri masyarakat bisa punah jika tidak mampu harmoni dengan dunia global. Hal ini mengisyaratkan gambaran dunia heterogen yang terasa semakin sempit. Sebagaimana dikemukakan oleh McLuhan bahwa di era globalisasi dewasa ini semua tidak bisa lepas dari kehidupan global, atau yang Alvin Tofler sebut bahwa dunia telah menjadi kampung besar (*global*

village) (Mahfud, 2006: 193). Kemajuan di bidang teknologi informatika berdampak sangat luas, dampaknya bukan saja pada bidang sosial, politik, budaya, tapi juga pendidikan, dan agama.

Gesekan dan perbedaan dalam berbagai ranah merupakan pemantik terjadinya konflik dan pertikaian di masyarakat. Contoh realitas ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena sebagaimana Ali Maksum menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk dan pluralis. Kemajemukan ini bisa menjadi kekuatan, namun juga bias menjadi boomerang. Kemajemukan bangsa Indonesia ini menjadi kekuatan jika dilihat dari dua perspektif, yaitu horizontal dan vertikal (Mahfud, 2006: 176). Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, budaya dan lain – lain. Dari segi agama, bangsa Indonesia memiliki kemajemukan, ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu dan ratusan agama kepercayaan lokal. Dari segi kultur, terdapat perbedaan adat istiadat antara satu daerah dengan daerah lain yang

tersebar dari Sabang sampai Merauke. Begitu pula dengan etnis, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku yang jumlahnya mencapai ribuan yang tersebar pada 17.667 pulau besar dan kecil di Indonesia. Semuanya adalah kekayaan Indonesia dalam kemajemukan. Namun, diketahui pula, Indonesia memiliki kekayaan dan khazanah kehidupan masyarakat dengan heterogenitasnya yang sangat tinggi, tentu saja kemajemukan ini bisa pada potensi konflik ketegangan sosial yang tidak mudah dipulihkan ke kondisi semula, dan ini menjadi boomerang jika tidak ada arahan ataupun visi misi yang sama dalam berbangsa dan bernegara.

Indonesia memandang keberagaman ini sebagai suatu kesatuan Indonesia, hal ini dibumisasikan dengan koridor Pancasila dan UU. Dalam perjalanan implementasinya, usaha dari pemerintah ternyata kurang diimbangi dengan fakta realitas sosial bangsa yang heterogen, kekerasan komunal, etnis dan bernuansa agama tersebut semakin menggejala dari tahun ke tahun dengan berkembangnya kompleksitas masalah kebangsaan yang dihadapi Indonesia modern. Adapun barometer konflik yang sering terjadi menurut *Karuna Center for Peacebuilding*

(<http://www.karunacenter.org>) adalah: Penolakan atas status dan akses yang sama terhadap kelompok lain (*restriction*) berupa organisasi – organisasi militan, Pandangan dan sikap yang menganggap kelompok lain lebih rendah (*dehumanization*) dan Pengabaian hak-hak sipil, politik, dan ekonomi (*opression*) dari paham radikal, dan aksi – aksi radikalisme seperti Penyerangan dan melakukan upaya pembunuhan (*act of aggression*), Pengorganisasian pembunuhan massal (*mass-violence*) atau terorisme, dan dikhawatirkan hingga pembasmian atas dasar identitas (*genocide*) yang sekarang ini menggejala di Suriah dan Perbatasan Turki dan Irak.

Hal yang terjadi diatas secara tidak langsung dan tidak serta merta tidak bisa lepas dari pola pemahaman agama dan beragama yang diperoleh dan yang diyakini si pelaku. Memang, memahami fenomena agama secara sosiologis mempunyai dualisme perspektif (dua topeng dalam satu wajah). Pada satu perspektif, agama dipandang sebagai ajaran *profertic* (sifat kenabian), ajaran ketuhanan, ajaran kasih sayang, saling menghormati antar manusia, saling menolong, kebersamaan dalam menyelematkan kehidupan, memelihara bumi, lingkungan dan

segala kekayaan alam untuk kemaslahatan manusia di muka bumi. Di perspektif yang lain agama dipandang sebagai potret instrumen kepentingan politik dan simbol, salah satu contohnya adalah syiar-dakwah (komaruddin Hidayat, 2012) dalam rangka hendak menundukkan dan melawan orang lain agar mereka mengikuti ajaran aliran yang diyakini (sebagai paham ajaran kebenaran tentang ketuhanan yang paling benar diantara lain-lainnya). Terlebih lagi dalam fakta transformasi ajaran agama yang dilaksanakan pada masyarakat Indonesia cenderung kurang menekankan pentingnya menghargai perbedaan, pendidikan sering dijadikan mediasi untuk menekankan keseragaman (iis Arifudin: 229). dan bahkan ada anomali-anomali bahwa pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam menjerumuskan kearah tindakan negatif, seperti: etnosentrisme, prejudis, stereotip, permusuhan, intoleransi, pelanggaran HAM, diskriminasi, marginalisasi, bias gender, korupsi, terorisme, anarkisme dan tindakan destruktif lainnya.

Merespon kebutuhan tersebut dan melihat realitas beberapa tahun terakhir yang semakin menggejala berkenaan dengan konflik (bernuansa

agama, kelompok ataupun perkumpulan gerakan), pemerintah sebenarnya telah merancang serangkaian upaya, mekanisme dan muatan pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, negara dan dunia pada umumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Oliva bahwa perangkat pendidikan merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat (Olivia, 1997:60) dengan mengkaji system pendidikan multicultural yang dikembangkan di perguruan tinggi akan didapat sebuah gerakan pembaharuan dan inovasi pendidikan yang diorientasikan dalam rangka membangun manusia Indonesia yang memiliki karakter. PTAI sebagai institusi pendidikan Islam memungkinkan untuk melakukan proses penumbuhkembangan kehidupan masyarakat multicultural.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan (*policy*) dan praktik (*practice*) pendidikan multikultural di Perguruan Tinggi Agama Islam turut mampu menghantarkan dan memberikan kontribusi memecahkan masalah ekstern maupun intern dari titik lemahnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini urgen dilaksanakan,

yakni sebagai mediasi rotasi fungsional kritis, transformatif dan legitimasi. Pendidikan Multikultural di PTAI akan membuka mata masyarakat untuk beragama yang matang jauh dari berperilaku eksklusif, primordialisme, ataupun literalisme yang destruktif. Penelitian ini juga menjadi nilai legitimatif dalam koreksi/pemecahan masalah berkenaan hambatan implementasi pendidikan multikultural di Kalimantan Selatan dan juga tentunya memberikan nuansa transformatif dalam mentransferkan ilmu, penanaman nilai dan pelaksanaan metodologi untuk kebijakan di PTAI Kalimantan Selatan pada umumnya dan IAIN Antasari Banjarmasin pada khususnya, sehingga pada ujung hakikat tujuannya ini yaitu turut serta aktif menciptakan peradaban Indonesia yang sesuai dengan falsafah Indonesia. Didasari pada hal tersebut maka peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Pendidikan Multikultural di IAIN Antasari Banjarmasin (Studi Analisis Kebijakan dan Praksis)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendidikan multikultural pada tataran kebijakan dan praktis di IAIN Antasari Banjarmasin?
2. Tipologi sikap pendidikan multikultural apa yang ada di IAIN Antasari Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan rencana pemecahan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pendidikan multikultural pada tataran kebijakan dan praktis di IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Mengetahui tipologi sikap pendidikan multikultural yang ada di IAIN Antasari Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Bagi Lembaga IAIN Antasari; Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi alternatif yang dapat digunakan

lembaga sebagai pengembangan document curriculum dan *actual curriculum* atau proses kurikulum di dalam perkuliahan, di lingkungan IAIN Antasari maupun di Masyarakat secara luas baik Lokal, Nasional, maupun Internasional

2. Bagi Lembaga PTAI; Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi alternatif yang dapat digunakan lembaga sebagai pengembangan PTAI agar tetap memelihara kearifan lokal namun juga berwawasan global dan juga untuk kemajuan pendidikan Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Selatan agar memiliki tipologi sikap pendidikan multikultural yang global.
3. Bagi Lembaga LP2M; Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih dalam menambah khazanah riset di pusat penelitian IAIN Antasari yang sesuai dengan visi msi IAIN Antasari Banjarmasin
4. Bagi Dosen; Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan sistem perkuliahan Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan proses perkuliahan yang berorientasi pada pendidikan multikultural, baik yang dirumuskan dalam

SAP/Silabus maupun berupa hidden kurikulum.

5. Bagi Mahasiswa; Agar mahasiswa memiliki kepekaan terhadap isu – isu ataupun wacana – wacana multikultural di lingkungan kampus dan mampu menjawab/ memecahkan masalah/ memberikan pemikiran kritis sesuai dengan tipologi sikap yang dikembangkan.
6. Bagi Peneliti; Dilaksanakannya penelitian ini, peneliti dapat mengetahui pendidikan multikultural di PTAI se Kalimantan Selatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan pada umumnya dan Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada khususnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka perlu adanya pemetaan tipologi yang diharapkan berdasarkan kebijakan dan praktis yang telah diupayakan agar terimplementasikannya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengarusutamakan dan berorientasi pada wawasan multikultural.

Pendekatan Pendidikan yang diterapkan adalah pendekatan pendidikan multikultural yang dikembangkan oleh James A. Banks. James Banks

menyebutkan bahwa pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*, artinya pendidikan multikultural haruslah menekankan dan mengeksplorasi bahwa perbedaan merupakan keniscayaan anugerah dari Tuhan yang sifatnya sunnatullah, yang kemudian bagaimana menyikapi perbedaan tersebut dengan semangat egaliter dan penuh toleransi.

Banks mengidentifikasi bahwa ada lima dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu suatu lembaga dalam mengimplementasikan program pendidikan yang mampu merespon terhadap perbedaan, yaitu dimensi integrasi isi/materi (*content integration*), dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*), dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*), dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*), dan dimensi pemberdayaan budaya kampus dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Pendidikan Multikultural tersebut dapat didekati dan dikaji menggunakan pendekatan kontributif, aditif, transformatif, dan pendekatan aksi sosial.

Tipologi sikap yang bisa dilihat dalam kaitannya pendidikan multikultural yaitu *ethnic psychological captivity*, *ethnic encapsulation*, *ethnic*

identities clarification, the ethnicity, multikultural ethnicity, dan globalism. Adapun globalism adalah tipologi yang dicita – citakan dari adanya pendidikan Multikultural.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini ada empat kata kunci yang merupakan dasar pemikiran peneliti yang akan dikomunikasikan dengan pembaca, yang menurut peneliti perlu dipertegas definisinya agar hasil penelitian ini dapat dimengerti oleh pembaca dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran istilah tersebut. Adapun konsep atau istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Pendidikan multikultural

Pendidikan multikultural adalah konsep, ide atau falsafah yang merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan eksplanasi dalam mengakui dan menilai urgensinya suatu keragaman budaya di masyarakat (Choirul Mahfud, 2006: 167). *Intinya, pendidikan multikultural dalam penelitian ini mengarah pada suatu proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah – tengah masyarakat yang heterogen.* Pendidikan

multikultural dapat berjalan dengan baik dilihat dari aspek kekuatan kognisi, model dan lingkungan, dimana seluruh civitas academia PTAI menjadi model utamanya dalam memberi pengenalan atau pemahaman nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya serta menjadikannya sebagai acuan dalam bersikap dan bertingkah laku.

2. IAIN Antasari Banjarmasin

IAIN Antasari Banjarmasin adalah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Suatu Universitas Islam dan satu-satunya Institut agama Islam di Kalimantan Selatan. Lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani km. 4,5 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Telp. (0511) 3252829 – Faks. (0511) 3254344.

3. Kebijakan dan Praksis

Kebijakan adalah konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan disebut juga rangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan yang dikaji disini adalah Visi, Misi, Tujuan, dan Renstra IAIN Antasari

Banjarmasin serta kebijakan-kebijakan yang terkait dalam praksis di IAIN Antasari Banjarmasin. Praksis adalah praktek bidang kehidupan dan kegiatan manusia. Maka dalam penelitian ini praksis dimaksudkan sebagai segala aktifitas ataupun kegiatan di IAIN Antasari yang direlasikan dengan ranah multikultural.

G. Kajian Pustaka

1. Pendidikan Multikultural

Pelaksanaan pendidikan multikultural sebagai *multikultural based intraction* pada mulanya digunakan oleh lembaga – lembaga Negara yang memiliki heterogenitas penduduk cukup tinggi sebagai langkah *affirmative action* dalam menolak rasisme dan diskriminasi, yang bermula dari kesadaran pentingnya mempelajari budaya orang-orang asing atau warga Negara mereka yang heterogen yang datang dari Negara-negara lain. Oleh karenanya, pendidikan multikulturalisme memerlukan dimensi-dimensi penting yang dengan dimensi tersebut dapat diketahui bagaimana pendidikan multikulturalisme itu dilaksanakan (Sulalah, 2012: 90). Untuk mengetahui konsep Pendidikan multikulturalisme penulis mengutip pendapat dari

pelopornya, Jamaes A. Banks. Mengutip pengertian multikulturalisme menurutnya adalah:

“Multikultural education is an idea, an educational reform movement, and a process, As an idea, multikultural education seeks to create equal educational opportunities for all students, including those from different racial, ethnic, and social-class groups. Multikultural education tries to create equal educational opportunities for all students by changing the total school environment so that it will reflect the diverse cultures and groups within a society and within the nation's classrooms. Multikultural education is a process because its goals are ideals that teachers and administrators should constantly strive to achieve”.

Pengertian pendidikan multikultural menurut A. Banks ini dimaknai sebagai sebuah konsep, ide atau falsafah yang merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan eksplanasi dalam mengakui dan menilai urgensinya suatu

keragaman budaya di masyarakat. Intinya pendidikan multikultural merupakan pendidikan untuk *people of color* yang menurut Anderson dan Curser bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan (Choirul Mahfud : 167)

Memaknai multikultural dalam konteks pendidikan sejatinya memiliki implikasi bahwa, secara operasional pendidikan multikultural pada dasarnya adalah program pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang beragam bagi peserta didik (*multiple learning environment*). Penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan akademik peserta didik. Beberapa ahli pendidikan semisal Hilda Hernandez yang dikutip dari karyanya yang berjudul: “*Multikultural education, a Teacher’s Guide to linking context, process, and content*”, menjelaskan bahwa *multikultural education* adalah suatu proses pendidikan yang memungkinkan individu untuk mengembangkan diri dengan cara merasa, menilai, dan berperilaku dalam system budaya yang berbeda dengan budaya mereka (Sulalah: 46-47) Disini terpahami bahwa ruang lingkup kajian meliputi ranah yang cukup luas, yaitu konteks, proses, dan konten, pengembangan kurikulum dan pengajaran dalam

perspektif multikultural. Pandangan esensi dari pendidikan multikultural tersebut sebagai mediasi transformasi ilmu pengetahuan hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Paulo Freire tentang esensi pendidikan.

Pandangan lain, pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntunan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang-orang Non-Eropa (Hilliard, 1991-1992). Sedangkan secara luas, pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya, seperti *gender, etnic, ras, budaya, strata social* dan *agama* (Choirul Mahfud : 169). Dalam konteks Indonesia, secara umum kajian terkait wacana pendidikan multikultural sudah banyak memperoleh perhatian dari para ahli, dan walaupun kebanyakan masih dalam konteks gagasan, namun positifnya adalah hal tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak warga

Indonesia yang masih peka, peduli, dan kritis dengan keadaan bangsa agar menjadi dan atau semakin lebih baik. Menurut Prof. HAR.Tilaar pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau *politics of recognition* (politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas).Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi dairahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas sterhadap budaya mainstream syang dominan , yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream *agama (Choirul Mahfud : 171)*. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural menurut Groski (Tobroni, dkk, 2007: 305) sebagai berikut:

1. Setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka.

2. Siswa belajar sebagaimana belajar dan berfikir kritis.
3. Mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman- pengalaman mereka dalam konteks belajar.
4. Mengakomodasikan semua gaya belajar peserta didik.
5. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok kelompok yang berbeda.
6. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok- kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda.
7. Untuk menjadi warga yang baik di sekolah maupun di masyarakat.
8. Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda.
9. Untuk mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global.
10. Mengembangkan keterampilan- keterampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari- hari.

Secara general, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang

pendidikan bagi semua peserta didik yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, kelompok budaya, dan agama. Pendidikan multikulturalisme sudah sepatutnya dijadikan strategi dalam mengelola kebudayaan dengan menawarkan strategi transformasi budaya yang ampuh yakni melalui mekanisme pendidikan yang menghargai perbedaan budaya (*different Of culture*), yang menurut HAR Tilaar (Choirul Mahfud : 175) bangsa yang tidak punya strategi untuk mengelola kebudayaan yang mendapat tantangan yang demikian dahsyatnya, dikhawatirkan akan mudah terbawa arus hingga akhirnya kehilangan jati diri lokal dan nasionalnya.

Berdasarkan penjelasan pendidikan multikultural tersebut maka dapat diikhtisarkan bahwa pendidikan multikultural menyangkut ranah ideologi karena berpotensi untuk menjadi sintesis yang dapat mendialektikakan diantara ideologi, oleh karena itu dari konsep kematangan beragama menurut agama diharapkan mampu menjadi acuan implementasi pendidikan multikultural. Hal ini juga berimplikasi pada *outcome* peserta didik kedepannya di masyarakat apakah nantinya menjadi warga masyarakat yang

saling menghargai atau tidak, apakah menjadi warga masyarakat yang saling pengertian atau tidak, dan apakah menjadi warga masyarakat yang saling percaya atau tidak dalam menyikapi berbagai perbedaan.

Di antara tujuan pendidikan agama adalah agar siswa gemar menjalankan ritual hidup sesuai tuntunan agama. Untuk kepentingan tiga hubungan tripartiat, mampu mempolakan hubungan privat tersebut dalam bentuk pengamalan untuk kemanusiaan dan kealaman mengikutituntunan agama. Agama yang ditujukan secara universal kepada segenap manusia dapat dipahami secara total-komprehensif (holistik) untuk menjunjung tinggi perdamaian, menuntun persaudaraan sesama manusia, dan kelestarian alam lingkungannya.

Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi Islam yang dilandasi dengan nilai-nilai multikultural akan mampu menghantarkan mahasiswa kepada kesalehan individu dan kesalehan sosial, karena seperti diketahui bahwa dalam pandangan Hilda Hernandez bahwa pendidikan multikultural adalah sebagai suatu proses pendidikan yang memungkinkan individu dapat mengembangkan diri dengan cara merasa,

menilai, dan berperilaku dalam system budaya yang berbeda dengan system budaya mereka. Konsep seperti ini dapat berkembang baik apabila ditanamkan secara sistematis sejak usia dini yaitu mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang tertinggi yang diarahkan menuju terwujudnya pembangunan karakter yang dalam proses pendidikan mesti melampaui tiga domain sebagaimana disinggung oleh Bloom dkk. dengan taksonominya; yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotorik (Sulalah, 2012: 66-67).

Dalam hakikatnya, seperti James definisikan Pendidikan Multikultural adalah pendidikan *people of Color*, artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan yang kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter, oleh karena itu pendidikan multikultural bisa digunakan sebagai sebuah pendekatan atau bisa juga digunakan sebagai bagian struktur kurikulum formal, namun yang signifikansi adalah lewat pendidikan multikultural (langsung maupun tidak langsung) sikap saling menghargai (*mutual respect*), saling pengertian (*mutual understanding*) dan saling percaya (*mutual trust*) dalam menyikapi berbagai

perbedaan akan terbangun dan berkembang dengan baik dilaksanakan (Sulalah, 2012: 70). Dan pada gilirannya sikap sadar, sensitif, toleran, respect terhadap identitas budaya, responsif terhadap permasalahan umat akan menjadi bagian hidup peserta didik. Melihat output tersebut, Oleh karena itu radikalisasi pendidikan multikultural pada proses pembelajaran sudah seharusnya dilaksanakan sejak sekolah Dini hingga pada jenjang perguruan Tinggi

Kaitannya dengan Pendidikan Islam, maka ada hal- hal prinsip yang perlu dijelaskan disini ketika mengimplementasikan nilai- nilai multikultural dalam wilayah keagamaan. Prinsip – prinsip penting yang harus dihormati dan dipedomani (Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2009: 36-38) :

1. Pelaksanaan nilai- nilai multikultural tidak boleh pada masalah aqidah karena hal ini berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap Tuhan nya.
2. Pelaksanaan nilai- nilai multikultural tidak boleh berada pada wilayah ibadah.
3. Pelaksanaan nilai- nilai multikultural tidak dalam hal- hal yang dilarang dalam ajaran agama

4. Pelaksanaan nilai-nilai multikultural hanya dibolehkan pada aspek-aspek yang menyangkut relasi kemanusiaan.

Mengacu kepada pelopornya, James Bank menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu (Choirul Mahfud, 169-170) :

- a. ***Content integration***; mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/ disiplin ilmu.
- b. ***The knowledge construction process***; membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin)
- c. ***An equity pedagogy***; menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar, siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya (*culture*) ataupun social.
- d. ***Prejudice reduction***; mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Kemudian melatih kelompok untuk berpartisipasi, berinteraksi

dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif.

Dari dimensi tersebut, Pendidikan multikultural yang digagas Banks tidak hanya sebatas pada “merayakan keragaman”, apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis apakah mungkin meminta siswa yang dalam kehidupan sehari-harinya dilingkupi budaya yang dominan, akan berjalan dengan aman dan harmoni? Katakanlah seperti Kalimantan, hal ini mengindikasikan adanya batasan wilayah yang bisa diterapkan ataupun disosialisasikan Pendidikan multikultural. Pada wilayah yang memiliki heterogenitas etnis cukup tinggi cukup tinggi. Pola pikir keagamaan dan pemahaman dengan pendekatan tersendiri. Perbedaan jendela pandang inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya keragaman mengenai ruang lingkup pendidikan multikultural (Sulalah: 61). Pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan (Choirul Mahfud : 184) yaitu :

1. Tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan

- (*schooling*), atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal,
2. Menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dan kelompok etnik. Oleh karena nya dalam implementasi pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecederungan memandang anak didik secara *stereotype* menurut edintats mereka; sebaliknya meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di aklangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.
 3. Karena pengembangan kompetensi dalam suatu “kebudayaan baru” biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, maka dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antithesis terhadap tujuan pendidikan multikultural.
 4. Pendidikanmultikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan, kebudayaan mana yang akn diadopsi ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proporsional.

5. Kemungkinan bahwa pendidikan meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan, kesadaran ini akan menjauhkan dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi.

Dalam uraian lain, meminjam empat kerangka dari J.A Banks pendidikan multikultural, secara teoretik pendidikan multikultural bisa didekati melalui beberapa pendekatan (Zakiyuddin Baidhawiy, 2005: 108-117), yaitu:

Pertama, **pendekatan kontributif**, yaitu pendekatan yang pendidikan dan subyek pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai keragaman pendidikan multikultural. Pendekatan ini dilakukan dengan menseleksi buku buku teks wajib atau anjuran. Dalam konteks pendidikan agama, tujuan utama pendekatan kontribusi terhadap muatan kurikulum ini adalah untuk memasukkan materi-materi paling sedikit keterlibatannya dalam reformasi tentang keragaman kelompok- kelompok keagamaan, kultural, dan etnik dalam kelompok tersebut. Dalam bentuk yang paling sederhana dengan menggabungkan sedikit bacaan multikultural

dalam tatap muka kelas, peringatan-peringatan hari suci agama- agama.

Kedua, pendekatan aditif dalam program berorientasi muatan ini mengambil bentuk muatan- muatan, konsep- konsep, tema- tema, dan perspektif- perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. Dengan pendekatan aditif pendidikan agama memanfaatkan muatan- muatan khas multikultural sebagai pemer kaya bahan ajar, konsep- konsep tentang harmoni dan kehidupan bersama antarumat beragama memberi nuansa untuk mencairkan kebekuan dalam merespon eksistensi agama- agama lain. Pengayaan perspektif ini dapat membangkitkan kepekaan siswa dalam mengamati gejala- gejala keagamaan dan berkembang dalam masyarakatnya.

Ketiga, pendekatan transformatif yang secara aktual berupaya mengubah struktur kurikulum dan mendorong siswa- siswa untuk melihat dan meminjau kembali konsep- konsep, kemudian memperbaharui pemahaman dari berbagai perspektif dan sudut pandang etnik. Versi kurikulum yang canggih melakukan transformasi dengan tujuan; mengembangkan muatan kurikulum melalui berbagai disiplin ilmu

pengetahuan; menggabungkan berbagai sudut pandang dan perspektif yang beragam dalam kurikulum; dan mentransformasi, utamanya mengembangkan suatu paradigma baru kurikulum. Aplikasi dalam pendidikan agama berarti membuat kurikulum baru dimana konsep-konsep, tema-tema, dan problem- problem yang menjadi muatan kurikulum didekati dengan pendekatan perbandingan.

Keempat, pendekatan aksi sosial yang mengkombinasikan pendekatan transformative dengan aktivitas-aktivitas yang berupaya untuk melakukan perubahan sosial. Dalam konteks ini pendidikan agama tidak sekedar menginstruksikan siswa untuk memahami dan mempertanyakan isu-isu sosial, namun sekaligus juga melakukan sesuatu yang penting berkenaan dengan isu tersebut.

Geneva Gay melakukan pengembangan pendidikan multikultural. Gay menawarkan empat macam pendekatan yaitu, dekonstruktif, inklusi, infuse, dan transformative (Sulalah, 2012: 128 – 129) (Geneva Gay, 1999: 560 – 563). ***Pendekatan dekonstruktif.*** Pendekatan ini sering dipahami sebagai kritik, dan pembongkaran sekaligus rekonstruksi pengetahuan oleh para

teoritis pendidikan. Menurutnya, tahap dekonstruksi mengarahkan pengajaran dan pembelajaran menuju upaya memelihara siswa untuk menjadi orang skeptis yang sehat, yakni yang secara konstan mempertanyakan klaim-klaim yang sudah ada terhadap kebenaran dan akurasi sosial dan akademik dalam rangka mencari penjelasan baru, dan untuk menentukan agar perspektif perspektif berbagai kelompok etnik dan kultural terwakili; dan pengetahuan, perspektif serta pengalaman yang secara kultural pluralistik dipergunakan sebagai kriteria untuk menguji kembali premis- premis dan asumsi- asumsi tentang sistem pendidikan yang sudah lama berjalan. Melalui tahap dekonstruksi aktivitas-aktivitas belajar dilaksanakan dalam kaitannya dengan isu- isu keragaman budaya dan dapat memasukkan upaya-upaya: (a) Memperjelas bias- bias yang diciptakan orang. (b) Menentukan cerita siapa yang dibicarakan dan divalidasi dari sudut pandang mana. (c) Terlibat dalam pengambilan perspektif. (d) Mawas diri, refleksi diri, dan memperbaharui diri.

Pendekatan inklusi, yaitu pendekatan yang menekankan kepada pengajaran factual tentang sejarah, warisan, dan kontribusi kelompok –

kelompok etnik dan cultural yang terpinggirkan dan tak terwakilkan dalam kurikulum pendidikan, sedang pengajaran terfokus pada konsep heroism, memperkenalkan pada seseorang tentang ragam budaya yang ada yang juga member kontribusi kepada masyarakat secara keseluruhan, dan mendefinisikan heroism kultural sesuai standar kelompok – kelompok etnik, agama, dan strata sosial yang berbeda.

Pendekatan infusi, yaitu pendekatan yang secara sistematis mengintegrasikan muatan, konteks, contoh – contoh dan sudut pandang dari berbagai kelompok untuk mengilustrasikan konsep – konsep, prinsip – prinsip, teori – teori, dan metode pencarian dari berbagai perspektif ke dalam seluruh kurikulum sehingga memperluas wilayah muatan, disiplin, program kuliah. Pendekatan ini membutuhkan perubahan substansial dalam proses pendidikan dan struktur kurikulum untuk memastikan pluralisme kultural integral dengan pengalaman belajar seseorang, baik mayoritas maupun minoritas.

Pendekatan transformatif, pendekatan yang menekankan pada aksi social dan politik untuk memecahkan masalah secara logis, melampaui konteks kelas tradisional. Dari sini

diharapkan muncul perubahan pedagogic yang mengakui bahwa kelas – kelas tradisional lebih menekankan pada pengajaran teks – teks yang sering memaparkan kategori – kategori tradisional dalam wacana dan evaluasi. Oleh karena itu, perlu mengganti model – model lama, atau setidaknya merevisi dan menciptakan yang baru. Untuk mengungkap ketepatan suatu pola, perlu adanya suatu kejelasan terlebih dahulu tentang pola – pola tertentu dalam konteks apa suatu strategi dibutuhkan.

Dalam pendekatan pendidikan multikultural tersebut juga diperlukan kajian dasar terhadap masyarakat. Secara garis-garis besar adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak ada dengan sendirinya. Masyarakat adalah ekstensi yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang.
2. Masyarakat bergantung pada upaya setiap individu untuk memenuhi kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi kebutuhan masing-masing.
3. Individu-individu, dalam berinteraksi dan berupaya bersama guna memenuhi kebutuhan, melakukan penataan terhadap upaya tersebut

dengan jalan apa yang disebut tantangan social.

4. Setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku antara individu dan komunitas yang membentuk masyarakat.
5. Pertumbuhan individu dalam komunitas, keterikatan dengannya, dan perkembangannya dalam bingkai yang menuntunnya untuk bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya (Choirul Mahfud, 186-187).

Oleh karena itu masyarakat sangat besar peranannya dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian tiap individu, sebab, keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan *macrosources* yang memiliki banyak alternatif untuk memperkaya khazanah pelaksanaan pendidikan multikultural.

2. Nilai – Nilai Multikultural di Perguruan Tinggi

Penanaman nilai – nilai multikultural pada tingkat Perguruan Tinggi diarahkan pada nilai multikultural yang telah dirumuskan oleh H.A.R Tilaar. Pendidikan multikultural dalam pandangan Tilaar benar- benar harus mampu mewujudkan

manusia cerdas. Pendidikan multikultural diarahkan untuk mengembangkan pribadi- pribadi manusia Indonesia agar menjadi manusia- manusia yang cerdas. Hanya manusia cerdaslah yang dapat membangun kehidupan bangsa yang cerdas. Manusia cerdas adalah manusia yang menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan sebaik- baiknya untuk peningkatan mutu kehidupan, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok, dan sebagai anggota masyarakat bangsanya.

Manusia cerdas merupakan manusia yang bermoral dan beriman sehingga kecerdasan yang dimilikinya bukan untuk memupuk kekuasaannya menguasai sumber- sumber lingkungan secara berlebihan ataupun di dalam kemampuannya untuk memperkaya diri sendiri secara idak sah (korupsi), tetapi seorang manusia cerdas yang bermoral pasti akan bertindak untuk tujuan yang baik. Selanjutnya manusia cerdas bukanlah yang ingin membenarkan apa yang dimilikinya, cita- citanya, agamanya, ideologi politiknya untuk dipaksakan kepada orang lain, tetapi seorang manusia yang cerdas yang megakui akan perbedaan- perbedaan yang ada di dalam hidup bersama sebagai kekayaan bersama dan dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Sehingga ia merumuskan ciri- ciri utama masyarakat cerdas yang dibutuhkan oleh Indonesia, yakni:

a. Cerdik Pandai (*educated*)

Dalam konteks Indonesia cerdas pandai bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang *up-to-date* dalam masyarakat, namun lebih dari itu harus mampu memahami adat istiadat yang berlaku di masyarakat, sehingga merekalah yang nantinya akan mempertimbangkan apakah adat istiadat yang sedang hidup atau dan terpelihara telah usang sehingga perlu diperbaiki, dan mengembangkan berbagai adat istiadat lain yang lebih sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Mereka yang disebut dengan manusia terdidik (H.A.R Tilaar, 2004: 195).

b. Energi Kreatif

Bangsa Indonesia pada masa kolonial terkenal dengan bangsa pemalas, bahkan ada ungkapan bahwa orang Indonesia dapat hidup sebenggol sehari (sebenggol sama dengan 2,5 sen). Namun di era globalisasi ini kita tidak dapat lagi bersikap menerima akan pemberian alam yang murah bagi kita tetapi alam merupakan suatu ruang terbatas yang merupakan paksaan seperti

ungkapan Daoed Joesoef. Pertambahan penduduk menyebabkan ruang kehidupan kita semakin lama semakin sempit, oleh karena itu kita harus mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk mengelola lingkungan diperlukan manusia-manusia yang energik dan kreatif sehingga dapat membangun masyarakatnya, bukan dapat bersaing dengan negara lain (H.A.R Tilaar, 2004: 197). Pendidikan Multikultural ini dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan khusus yang terpendam dari banyak suku bangsa Indonesia yang terkenal sangat energik dan kreatif.

c. Responsif terhadap Tuntutan Masyarakat demokratis

Amanat UUD 1945, yaitu ingin membangun suatu masyarakat demokratis. Hal ini berarti setiap masyarakat perlu memiliki sikap yang diminta oleh suatu masyarakat demokratis. Yang diminta dalam masyarakat demokratis bukan hanya sekedar perwujudan dalam bentuk institusional (lembaga perwakilan rakyat, lembaga kehakiman dan lainnya) namun yang penting adalah anggota dari masyarakat demokratis harus

memiliki *civic skill* yaitu tingkah laku sebagai warga negara yang baik.

d. Daya Guna (*Skilled*)

Anggota masyarakat yang demokratis adalah anggota yang produktif. Untuk menjadikan masyarakat yang produktif harus mempunyai kesadaran sebagai warga dari masyarakatnya. Oleh sebab itu “*Skilled people*” merupakan syarat dari suatu masyarakat yang produktif dan demokratis. Pendidikan multikultural bukan hanya bertujuan untuk menimbulkan rasa harga diri atau identitas dari masing- masing kelompok tetapi juga kemungkinan untuk mengapresiasi keterampilan- keterampilan spesifik yang dimiliki oleh kelompok.

e. Akhlak Mulia (*Moral-Religious*)

Masyarakat dapat bertahan jika antara kemampuan intelektual dibarengi dengan kemampuan akhlak mulia. Karena jika kita lihat sejarah bahwa pengetahuan dapat menjadi *boomerang* bahkan menghancurkan manusia seperti alat pemusnahan masal yang dapat merugikan orang lain. Salah satu sikap orang yang akhlak mulia adalah sikap toleransi. Toleransi artinya menghargai sesama manusia meskipun

sesama manusia itu berbeda dengan dirinya dalam hal apapun.

f. Sopan santun (*Civilzed*)

Sifat- sifat dijelaskan diatas belum memadai bagi seorang yang hidup dalam ruang multietnis dan multibudaya seperti di Indonesia. Modal utama komunikasi dalam masyarakat yang multietnis dan multibudaya adalah sopan santun. Karena tidak jarang terjadi perselisihan karena dianggap kurang sopan karena ia tidak memahami adat istiadat orang lain (H.A.R Tilaar, 2004: 197)

Pada tabel berikut dijelaskan tentang ciri-ciri manusia cerdas yang menjadi harapan dalam pendidikan multikultural di Perguruan Tinggi:

Tabel 1.1 nilai- nilai Pendidikan Multikultural

Sikap & Tingakh Laku	Kompetensi
Cerdik-pandai (<i>educated</i>)	Kemampuan analitis; Dapat mengambil pilihan; Menguasai ilmu pengetahuan; Gemar belajar

Energik-kreatif	Daya kreatif; Rajin, kerja keras; Tahan uji
Responsif terhadap masyarakat demokratis	Toleransi terhadap perbedaan; Persatuan Indonesia Pluralistik; Inklusivisme
Daya Guna (<i>skilled</i>)	Keterampilan yang bermanfaat; Pemanfaatan sumber daya alam
Akhlak Mulia	Bermoral; Antikorupsi, antikolusi; Religius substantif
Sopan santun	Mengenal adat istiadat; Mengenal tata pergaulan internasional

Dalam implementasi pendidikan multikultural, baik secara umum maupun pada tataran Perguruan Tinggi dapat diidentifikasi perkembangan sikap seseorang dalam kaitannya dengan kebudayaan-kebudayaan lain dalam masyarakat lokal sampai kepada masyarakat dunia global. James Banks mengemukakan beberapa

tipologi sikap dalam bentuk *cultural identity* (Choirul Mahfud, 194-195) yaitu:

1. ***Ethnic psychological captivity***; pada tingkat ini, sikap masih terperangkap dalam stereotipe kelompoknya sendiri, dan menunjukkan rasa harga diri yang rendah. Sikap tersebut menunjukkan sikap kefanatikan terhadap nilai-nilai budaya sendiri dan menganggap budaya lain inferior.
2. ***Ethnic encapsulation***; sikap terperangkap dalam kapsul kebudayaannya sendiri terpisah dari budaya lain. Sikap ini biasanya mempunyai perkiraan bahwa hanya nilai-nilai budayanya sendiri yang paling baik dan paling tinggi, dan biasanya mempunyai sikap curiga terhadap budaya atau bangsa lain.
3. ***Ethnic identities clarification***; mengembangkan sikapnya yang positif terhadap budayanya sendiri dan menunjukkan sikap menerima dan memberikan jawaban positif kepada budaya-budaya lainnya. Untuk mengembangkan sikap yang demikian maka seseorang lebih dahulu perlu mengetahui beberapa kelemahan budaya atau bangsanya sendiri.

4. *The Ethnicity*; menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap budaya yang datang dari etnis /budaya lain, seperti budayanya sendiri.
5. *Multikultural Ethnicity*; pribadi ini menunjukkan sikap yang mendalam dalam menghayati kebudayaan lain di lingkungan masyarakat bangsanya.
6. *Globalism*; Pribadi ini dapat menerima di berbagai jenis budaya dan bangsa lain. Mereka dapat bergaul secara internasional dan mengembangkan keseimbangan keterikatannya terhadap budaya bangsa dan budaya global.

Dari sikap tipologi diatas paradigma pendidikan multikultural di Perguruan Tinggi sudah semestinya hadir dalam dinamika prosesnya, khususnya untuk Perguruan Tinggi Islam. Dari Tipologi tersebut terbaca perspektif ke- multikultural-an seperti apa yang telah dan akan dikembangkan dalam implementasinya, yang tentu saja sedikit banyak telah turut serta sandil dalam memberikan pemecahan masalah di Negara Heterogen Indonesia dan menuju pada cita-cita bangsa yang ber- *Bhineka Tunggal Ika*.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Kajian ini lebih cenderung hanya mengamati dan menelusuri Pendidikan Multikultural di IAIN Antasari Banjarmasin (Studi Analisis Kebijakan dan Praksis)”.

Peneliti berupaya untuk memperoleh dan mengumpulkan data untuk mendeskripsikan pendidikan multikultural pada tataran kebijakan dan praktis di IAIN Antasari Banjarmasin dan untuk mengetahui tipologi sikap pendidikan multikultural yang ada di IAIN Antasari Banjarmasin.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin Jalan A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Telp. (0511) 3252829 – Faks. (0511) 3254344.

3. Data dan Sumber Data

Data yang penulis gali dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini yakni: Pendidikan Multikultural di IAIN Antasari Banjarmasin

(Studi Analisis Kebijakan dan Praksis), yang digali berdasarkan pendekatan pendidikan multikultural yang dikaji menggunakan pendekatan kontributif, aditif, transformatif, dan pendekatan aksi sosial. Pendekatan-pendekatan tersebut bermuara pada lima dimensi pendidikan multikultural baik dilihat dari kebijakan yang ada maupun praksis, yaitu dimensi:

1. Integrasi isi/materi dalam kurikulum
2. Konstruksi pengetahuan dalam perkuliahan maupun program kegiatan
3. Pengurangan prasangka dalam kultur kampus
4. Pendidikan yang sama/adil
5. Pemberdayaan budaya kampus dan struktur sosial.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sejarah singkat IAIN Antasari Banjarmasin dan visi misinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data lapangan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek.

Adapun teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala (atau fenomena) yang sedang diselidiki (Amirul Hadi dan Haryono,1998: 94). Peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data berbagai hal yang berupa perilaku subjek, kondisi sekitar yang diamani, fakta sosial, atau gabungan dari ketiganya. Peneliti ikut merasakan apa yang dihayati dan diyakini oleh responden sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang diketahui bersama (baik dari pihak peneliti maupun responden penelitian). Kegiatan observasi dilaksanakan dengan bantuan seperti pemanfaatan instrumen tertulis, *MP3 Recorder*, dan *Camera Digital*. Pemakaian teknik observasi langsung dalam penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data yang valid dengan melihat secara langsung pendidikan multikultural di IAIN Antasari Banjarmasin, baik dari perspektif kebijakannya maupun praksisnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan

kepada tujuan penelitian. Pewawancara disebut *interviewer* dan orang yang diwawancarai *interviewee* (Amirul Hadi dan Haryono,1998: 97). Wawancara dilakukan untuk memperoleh makna yang rasional, hal ini mengacu bahwa observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan teknik pengumpulan data secara semistruktur (Sugiyono: 320). Disini dilakukan dialog langsung dengan sumber data (Pemangku Kebijakan/Rektor/Dekan di IAIN Antasari Banjarmasin) yang mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis. Ketika wawancara mendalam, peneliti tidak menggunakan pola dan struktur yang ketat, tetapi terkendali dengan menggunakan pertanyaan yang semakin memfokus. Wawancara digunakan untuk memperoleh dan mempertajam data yang berkaitan dengan pendidikan multikultural di IAIN Antasari Banjarmasin.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Amirul

Hadi dan Haryono: 110). Dokumen-dokumen yang digunakan adalah dokumen tertulis yang resmi maupun tidak resmi. Intinya, metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang ada dalam arsip atau dokumen resmi di lokasi penelitian yang terkait dengan persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode dokumentasi digunakan karena menjadi salah satu sumber data yang bersifat alamiah, stabil, dan bebas dari kecenderungan subyektif peneliti.

5. Analisis Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nasution bahwa teknik analisis dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni: 1) reduksi data; 2) penyajian data (*display data*); dan 3) mengambil kesimpulan dan verifikasi (S. Nasution:129).

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono: 339). Data yang diperoleh nantinya ditulis peneliti dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil menghiatkan dan memilah-milah berdasarkan

satuan konsep, tema, dan kategori tertentu kemudian memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

Intinya, reduksi digunakan untuk mempertajam fenomena yang betul-betul ada di lapangan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Reduksi fenomenologis. Pada tahap ini, peneliti dengan sengaja menanggukkan beberapa fenomena yang ada karena tidak esensial. Penanggukan dilakukan karena fenomena tersebut berkaitan dengan kedudukan dan keadaan sesaat yang terjadi ditempat itu, dan saat itu.
- 2) Reduksi editik, pada tahap ini, peneliti berusaha mengupas kulit yang membungkus untuk mencari esensi yang ada di dalamnya (Moh. Shochib,1998:50).

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data, yaitu mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Intinya, data yang

diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya (Moh. Shochib,1998:50). Namun dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk bagan dan uraian singkat.

Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan karena data yang telah diperoleh sangat tentatif, kabur, dan diragukan. Akan tetapi, dengan bertambah data maka kesimpulan tersebut lebih “*grounded*”. Oleh karena itu setelah menarik kesimpulan haruslah senantiasa melakukan verifikasi data selama penelitian berlangsung, agar menjamin kebenaran data yang disajikan (Moh. Shochib,1998:50). Langkah ini merupakan langkah terakhir kegiatan yang dilakukan peneliti dari pengumpulan data hingga pengolahan data, sehingga data yang disajikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

6. Pengecekan Keabsahan Data

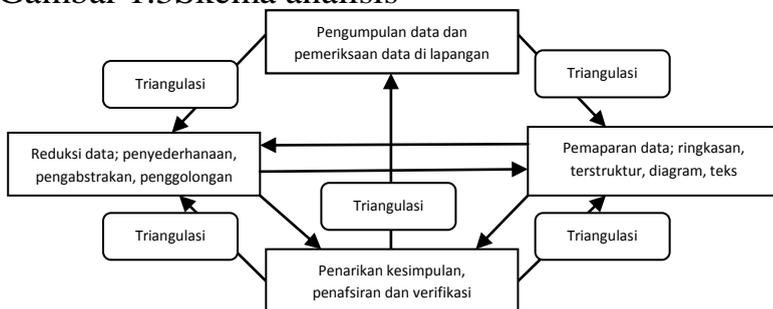
Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, ada beberapa cara yang dipakai, yaitu: Triangulasi (Sumber, Metode, Peneliti, dan Teori); Perpanjangan Keterlibatan; Ketekunan Pengamatan; Pengecekan Responden, dan; Penggalan data pada kelompok lain (Lexy J, Moleong, 1998: 190) (Noeng Muhadjir, 1989: 41-45) (Sugiyono, 2008: 247).

Tidak semua cara dipakai dalam penelitian ini, cara yang dipakai untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah perpanjangan keterlibatan dan triangulasi. Perpanjangan waktu keterlibatan/ pengamatan dilakukan dengan mengadakan penelitian selama kurang lebih 1 Bulan. Perpanjangan pengamatan diperlukan untuk dapat menangkap fenomena yang benar-benar asli, karena tanpa perpanjangan pengamatan dapat mengakibatkan data yang diperoleh hanya merupakan tindakan yang dibuat-buat oleh subyek yang diteliti. Prakteknya peneliti mencatat semua peristiwa yang terjadi dan kemudian langsung melakukan reduksi data untuk menarik kesimpulan sementara.

Triangulasi dipakai untuk mengadakan pengecekan data yang telah diperoleh dalam

penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari informasi yang satu dengan informasi lain. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan atau wawancara pertama dengan pengamatan atau wawancara berikutnya. Triangulasi peneliti adalah konsultasi peneliti dengan dosen pembimbing. Triangulasi teori dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada. Triangulasi digunakan agar data yang diperoleh betul-betul akurat, bukan rekaan peneliti, dan informan. Teknik triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang ada, dalam memahami proses analisis yang dilakukan, skemanya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3 Skema analisis



Setelah aktivitas analisis data dilakukan maka ada dua hal mendasar yang dilaksanakan selanjutnya yakni melakukan pengecekan keabsahan temuan dan informasi dan narasi hasil analisis. Keabsahan hasil penelitian ini dilihat berdasarkan pada (Lexy J, Moleong, 1998: 175-187).

1) Kredibilitas (Validitas Internal)

Keabsahan atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui : (1) Meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di lapangan; (2) Pengamatan secara terus menerus; (3) Trianggulasi, baik metode, dan sumber untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain, dilakukan, untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan sejumlah data; (4) Pelibatan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian; (5) Menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan kebenaran data yang diperoleh, dalam bentuk rekaman, tulisan, *copy-an* , dll; (6) Memberi *check/* pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan dengan

kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

2) Transferabilitas

Dalam penelitian kualitatif, transferabilitas hasil penelitian disebut generalisasi. Transferabilitas berkaitan dengan kemungkinan penerapan hasil penelitian dalam situasi lain yang mirip (Sugiyono: 376). Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti selanjutnya diaplikasikan, penelitian ini memperoleh tingkat yang tinggi bila para pembaca laporan memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

3) Dependabilitas dan Konformabilitas

Dilakukan dengan *audit trail* berupa komunikasi dengan pembimbing dan dengan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berkaitan dengan data yang dikumpulkan. Sedangkan kegiatan terakhir yaitu narasi hasil analisis yakni pembahasan dalam penelitian kualitatif menyajikan informasi dalam bentuk teks tertulis atau bentuk-bentuk gambar (mati atau hidup seperti foto dan video dan lain-lain). Dalam menarasikan data kualitatif ini ada beberap hal yang peneliti perhatikan yaitu;

membuat bentuk (*form*) yang digunakan dalam menarasikan data. menghubungkan hasil yang berbentuk narasi itu menunjukkan tipe/bentuk keluaran yang sudah didesain sebelumnya, dan penjelasan keluaran yang berupa narasi itu mengkoparasikan antara teori dan literasi-literasi lainnya yang mendukung topik. Maka dari semua aktifitas tersebut akhirnya dihasilkanlah kesimpulan berkenaan penelitian yang dilakukan; Pendidikan Multikultural di IAIN Antasari Banjarmasin (Analisis Kebijakan dan Praksis)

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah IAIN Antasari Banjarmasin

Berawal dari kesadaran penyempurnaan pendidikan Islam sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan akhirnya IAIN Antasari berdiri dengan beberapa dorongan:

1. Sebelum masa kemerdekaan kesempatan melanjutkan studi bagi lulusan madrasah ‘alimah atau sederajat ke tingkat yang lebih tinggi sangat terbatas. Hanya mereka yang mampu saja yang memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan agama ke luar negeri, seperti Mesir atau Saudi Arabia. Dengan didirikannya perguruan tinggi agama Islam di daerah ini, Kalimantan Selatan maka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi akan terbuka lebar bagi mereka yang berminat.
2. Perubahan masyarakat yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan menyebabkan lahirnya masalah – masalah baru dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Kelahiran perguruan tinggi agama yang

menghasilkan tenaga – tenaga terdidik ini diharapkan mampu memecahkan masalah tersebut.

Langkah konkrit untuk mewujudkan perguruan tinggi agama ini ditempuh melalui Kongres Umat Islam Kalimantan pada tanggal 15-19 Juli 1947 yang kemudian dilanjutkan dengan Kongres Serikat Muslimin Indonesia pada tanggal 17-20 Januari 1948 di Banjarmasin.

Kemudian pada tanggal 28 Februari 1948 di Barabai terjadi kesepakatan antara ulama dan tokoh pendidik untuk membentuk sebuah badan yang dinamakan “Badan Persiapan Sekolah tinggi Islam Kalimantan” berkedudukan di Barabai dan diketuai oleh H. Abdurrahman Ismail, M. A. Adapun ulama yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain: K. H. Hanafie Gobit dan H. M. Nor Marwan dari Banjarmasin, H. Usman dan M. Arsyad dari Kandangan (Hulu Sungai Selatan), H. Mukhtar, H. M. As’d, H. Abdurrahman Ismail, H. Mansyur, dan H. Abdul Hamid dari Barabai (Hulu Sungai Tengah) serta H. Juhri Sulaiman, H. A. Hasan dan K. H. Idham Khalid dari Amuntai (Hulu Sungai Utara).

Kemudian atas prakarsa pemuka masyarakat Amuntai yang dipelopori H. Ahmad

Hasan memutuskan untuk membentuk wadah kerjasama baru dengan nama “Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Rasyidiyah (PPTAIR).” Usaha inipun menemui jalan buntu. PPTAIR baru yang dipelopori H. A. Wahab Sya’rani pada tahun 1956 di Amuntai ini mengalami nasib yang sama. Bahkan, terpaksa dibubarkan.

Kandasnya usaha terakhir ini sungguh mengkhawatirkan masyarakat tentang masa depan generasi muda lulusan madrasah setingkat ‘Aliyah yang tidak menentu. Kekhawatiran tersebut akhirnya tidak berlangsung lama setelah dibentuknya kerjasama antara tokoh-tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah/ gubernur Kalimantan selatan, H. Maksid Masyarakat mengirim sebuah delegasi khusus membicarakan hal tersebut kepada Gubernur. Gubernur langsung turun tangan dalam pembentukan sebuah fakultas agama ditiap kabupaten melalui Bupati yang bersangkutan. Akhirnya pada bulan September 1961 berdiri 3 buah Fakultas Agama di tiga kabupaten, yakni Fakultas Ushuluddin di Amuntai, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas adab (sebelumnya bernama Akademi Agama Islam dan Bahasa Arab) di Kandangan.

Ketiga fakultas ini dibina oleh Badan Koordinator di Banjarmasin yang diketuai Gubernur sendiri (H. Maksid) dan H. Abdurrasyid Nasar selaku sekretaris. Langkah selanjutnya adalah mengintensifkan pembinaan perguruan tinggi agama tersebut agar berjalan lancar. Cita-cita mendirikan fakultas agama di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan ini tidak pernah padam. Pada tanggal 21 September 1958 diresmikan berdirinya Universitas lambung Mangkurat Banjarmasin dengan 4 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam ini umurnya tidak begitu lama karena kemudian berubah menjadi fakultas Islamologi dengan ketuanya H. Abdurrahman Ismail, M. A (Alm.) dan Sekretaris H. Mastur Juhri, M. A (Alm.). dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 dibentuk Panitia Persiapan Fakultas Syari'ah Banjarmasin untuk Penegerian Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syari'ah Banjarmasin. Dengan keluarnya Peraturan Presiden RI No. 11 tahun 1960 maka peluang untuk menegerikan Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syari'ah Banjarmasin. Dengan keluarnya Peraturan Presiden RI No. 11 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

dan Peraturan Presiden No. 27 tahun 1963 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 maka peluang untuk menegerikan Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syari'ah terbuka lebar. Selain Peraturan Presiden itu, TAP MPRS tanggal 3 Desember 1960 No.II/MPRS/1960 yang disusul dengan Resolusi MPRS No.1/MPR/1963 memberikan dasar pijakan yang lebih kuat lagi. Hasrat untuk mengembangkan pendidikan Agama dan perluasan Fakultas Agama.

Panitia Persiapan Fakultas Syari'ah mengutus H. M. Daud Yahya (Alm.) dan Abdurrivai, B. A (Sekarang Drs. H. Abdurrivai) untuk menghadap Menteri Agama K. H. M. Wahib Wahab (Alm.) di Jakarta dalam upaya penergian Fakultas Islamologi Unlam menjadi Fakultas Syari'ah. Usaha delegasi Panitia Persiapan Fakultas Syari'ah ini tidak sia – sia. Dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 28 tahun 1960 tanggal 24 Nopember 1960 yang ditandatangani oleh K. H. Wahib Wahab diresmikan penergian Fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syari'ah sebagai cabang Al Jami'ah Al Islamiah Al Hukumiah Yogyakarta. Fakultas Syari'ah ini terhitung mulai tanggal 15 Januari 1961 M bertepatan dengan

tanggal 27 Rajab 1380 H yang digawangi H. Abdurrahman Ismail sebagai Dekan. Fakultas Syari'ah ini sejak tahun 1961-1965 menempati kantor di jalan Lambung Mangkurat bersama 3 fakultas lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat. Proses perkuliahan menggunakan gedung bekas kodam X/LM di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada tahun 1965 Kantor Fakultas Syari'ah dan sebagian perkuliahan dipindahkan ke gedung Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) di Jalan Sungai Mesa Darat. SMIA kemudian menjadi SP IAIN dan terakhir menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin. Fakultas Syari'ah menjadi modal berdirinya IAIN Antasari yang pada bulan Nopember 1964 telah meluluskan Sarjana muda (B. A.) sebanyak 25 orang.

Walaupun Fakultas Islamologi Universitas Lambung Mangkurat telah menjadi Fakultas Syari'ah Cabang Al Jami'ah Yogyakarta keinginan masyarakat Kalimantan Selatan untuk Kalimantan Selatan untuk memiliki sebuah perguruan tinggi agama Islam di daerah ini dirasakan belum terpenuhi seluruhnya. Kemudian berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah gabungan ketiga fakultas yang ada di Kabupaten,

maka hubungan koordinasi ditingkatkan dan sepakat untuk mendirikan Universitas Islam Antasari yang disingkat Unisan. Unisan ini langsung dipimpin oleh Gubernur Kalimantan selatan, H. Maksid sebagai Presidennya. Dalam melaksanakan tugas sebagai Presiden UNISAN ini beliau dibantu oleh H. Mukhyar Usman membidangi pendidikan, Abd. Gafar Hanafiah membidangi keuangan, H. Abd. Rasyid Nasar membidangi kemahasiswaan, dan H. M. Irsyad Jahri sebagai Sekretaris.

Pengumuman resmi berdirinya UNISAN ini dibacakan oleh H. Maksid pada tanggal 17 Mei 1962 di lapangan Dwi Warna Barabai sebagai bagian dari kegiatan peringatan Hari Proklamasi ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang ke-13. Upacara tersebut dihadiri oleh Panglima ALRI, Laksamana R. E. Martadinata. Pada tahun itu juga Fakultas Publisistik di Banjarmasin yang dipimpin oleh H. Jafri Zam Zam bergabung dengan UNISAN. Kemudian UNISAN memiliki 4 Fakultas, yaitu: (1) Fakultas Ushuluddin di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara; (2) Fakultas Tarbiyah di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah; (3) Fakultas Adab di Kandangan,

Kabupaten Hulu Sungai selatan, dan; (4) Fakultas Publisistik di Kotamadya Banjarmasin.

Adanya Peraturan Presiden nomor 11 tahun 1960 tentang IAIN Al Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah dan Ketetapan Menteri Agama Nomor 35 tahun 1960 tentang pembukaan resmi Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah serta Ketetapan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1960 tentang penyelenggaraan IAIN. Kemudian dipihak lain berdirinya UNISAN tahun 1961 serta adanya Fakultas Syari'ah Cabang Al-Jami'ah Yogyakarta menjadi modal utama para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendirikan IAIN di Kalimantan Selatan. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang dan penegerian Fakultas Tarbiyah di Barabai, fakultas Ushuluddin di Amuntai, dan Fakultas syari'ah di Kandangan ditambah dengan Fakultas Syari'ah Cabang Al-Jami'ah Yogyakarta tepat pada tanggal 20 Nopember 1964 berdasarkan pada Kepmenag nomor 89 tahun 1964 diresmikan pembukaan IAIN Al-Jamiah Antasari yang berkedudukan di Banjarmasin dengan rektor pertama H. Jafry Zam-Zam.

Pada saat IAIN Antasari diresmikan tahun 1964 fakultas – fakultas yang sudah ada di

Banjarmasin dan di daerah – daerah kabupaten yang berasal dari UNISAN dijadikan Fakultas-Fakultas Negeri di bawah IAIN Antasari. Ada empat Fakultas yang resmi dikelola, yaitu: (1) Fakultas Syari'ah di Banjarmasin; (2) Fakultas Syari'ah di Kandangan; (3) Fakultas Tarbiyah di Barabai; (4) Fakultas Ushuluddin di Amuntai.

Sebagaimana IAIN Antasari lainnya, Rektor merasa perlu agar Pusat Institut tidak hanya memiliki satu fakultas, melainkan harus memiliki fakultas yang lengkap. Disamping itu daerah yang belum ada fakultasnya juga dirintis usaha untuk mendirikan Fakultas cabang. Hal ini didorong oleh keinginan untuk memudahkan calon mahasiswa yang tidak mampu ke luar daerah agar bis amelanjutkan studinya di daerahnya sendiri dan keinginan mendidik generasi Islam yang berpendidikan perguruan tinggi secara luas. Sebagai realisasi dari keinginan tersebut kemudian berturut – turut berdirilah beberapa fakultas di daerah, yaitu: (1) Fakultas Tarbiyah di Banjarmasin yang diresmikan pada tahun 1965; (2) Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura yang diresmikan pada tahun 1969; (3) Fakultas Tarbiyah Cabang Rantau yang diresmikan pada tahun 1970; (4) Fakultas

Tarbiyah Cabang Kandangan; (5) Fakultas Dakwah Banjarmasin yang didirikan pada tahun 1970.

Sejak berdirinya pada tahun 1964 hingga 1970 IAIN Antasari telah berkembang menjadi Sembilan fakultas. Pada tahun 1973 pimpinan IAIN Antasari mengadakan evaluasi terhadap jalannya fakultas – fakultas di daerah dan akhirnya diputuskan untuk mengintegrasikan Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura, Rantau, dan Kandangan ke Banjarmasin. Selanjutnya tahun 1978 Fakultas syariah di Kandangan diintegrasikan ke Fakultas Syariah di Banjarmasin. Fakultas Tarbiyah di Barabai diintegrasikan ke Fakultas Tarbiyah Banjarmasin, dan fakultas Ushuluddin di Amuntai dipindahkan ke Banjarmasin. Proses pengintegrasian dan pemindahan ini berakhir pada tahun 1980. Sehingga mulai tahun 1980 IAIN Antasari Banjarmasin hanya mempunyai 4 fakultas yang semuanya ada di Banjarmasin, yaitu: (1) Fakultas Syariah; (2) Fakultas Tarbiyah; (3) Fakultas Dakwah; (4) Fakultas Ushuluddin.

Pada tahun 1988 Fakultas yang ada di IAIN Antasari bertambah menjadi enam, yaitu dengan diintegrasikan Fakultas tarbiyah Palangka Raya

dan Fakultas Tarbiyah Samarinda sebagai Cabang dari IAIN Antasari. Keinginan mendirikan Program Pascasarjana di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin telah muncul sejak tahun 1995-an. Keberadaan Program Pascasarjana dinilai penting untuk didirikan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a) Untuk meningkatkan mutu dan kualifikasi dosen – dosen IAIN Antasari, khususnya bagi mereka yang belum dapat mengikuti Program PPs di luar Kalimantan Selatan. Peningkatan mutu dan kualifikasi tersebut khususnya bagi mereka yang masih pada jenjang starta satu (S1) yang prosentasinya masih sangat besar dari jumlah dosen yang ada.
- b) IAIN Antasari adalah satu-satunya IAIN yang ada di pulau Kalimantan. Hal ini untuk memudahkan proses percepatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di pulau Kalimantan. Namun, karena keterbatasan sarana dan sumber daya yang ada pada saat itu keinginan tersebut masih belum dapat terlaksana.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1999 ketika IAIN Antasari sudah memiliki lima

orang guru besar dan sejumlah dosen yang bergelar doktor keinginan untuk segera mendirikan Program Pascasarjana di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin semakin diintensifkan. Atas prakarsa Prof. Aswadie Syukur, Lc. Rektor ketika itu dibentuklah tim yang bertugas untuk membuat proposal pendirian Program Pascasarjana. Setelah melalui proses diskusi dan beberapa kali perbaikan akhirnya proposal tersebut dipresentasikan di Departemen Agama Pusat Jakarta. Presentasi ini dipimpin oleh Rektor Prof. H. M. Aswadie Syukur, Lc. Yang beranggotakan: Prof. Dr. Zurkani Jahja, Dr. H. A. Fahmi Arief, M. Ag. Dr. Kamrani Buseri, M. A, Dr. Asmaran AS, M. A, Dr. Muhammad Hasyim, M. A, dan Drs. Syuhada, S.H., M. M. yang mewakili Departemen Agama pada presentasi tersebut adalah Dr. H. Husni rahiem (Dirjen Binbaga Islam), Dr. Komaruddin Hidayat (Ditbinperta), Prof. Dr. Anah Suhainah, dan sejumlah staf Ditbinperta. Presentasi menghasilkan perlunya visitasi (kunjungan lapangan) ke Banjarmasin oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh Departemen Agama RI. Hasil visitasi tersebut antara lain menyatakan bahwa IAIN Antasari layak menyelenggarakan Program

Pascasarjana. Tindak lanjut dari hasil visitasi tersebut pada tanggal 1 Agustus 2000 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan surat keputusan Nomor E/176/2000 tentang persetujuan pembukaan Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Program Pascasarjana mengadakan kuliah perdana pada tanggal 3 September 2000, sedangkan pembukaan Program Pascasarjana secara resmi dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. M. Syachriel Darham pada tanggal 2 Oktober 2000.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1999 Fakultas Tarbiyah Palangka Raya berubah menjadi STAIN Palangka Raya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda menjadi STAIN Samarinda. Sehingga sampai saat ini IAIN Antasari kembali menjadi empat fakultas dan satu Program Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Syariah; (2) Fakultas Tarbiyah; (3) Fakultas Dakwah; (4) Fakultas Ushuluddin; dan (5) Program Pascasarjana

Mulai tahun 2013 organisasi dan tata kerja IAIN Antasari terjadi perubahan sesuai dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2013 yaitu: (1) Fakultas Syariah menjadi Fakultas

syariah dan Ekonomi Islam; (2) Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan; (3) Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi; (4) Fakultas Ushuluddin menjadi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora; (5) Program Pascasarjana menjadi Pascasarjana.

B. Pimpinan IAIN Antasari Banjarmasin dari masa ke masa

Sebuah perguruan tinggi tidak akan bergerak secara maksimal tanpa kontribusi dari seorang rektor, pemimpin sebuah perguruan tinggi, begitu juga IAIN Antasari Banjarmasin. Sejak berdirinya hingga sekarang IAIN Antasari telah memiliki 7 orang pimpinan yaitu:

1. H. Jafri Zam Zam (Alm.) (1964 – 1972)
2. H. Mastur Jahri, M. A. (Alm.) (1972 – 1982)
3. Drs. H. M. Asy'ari, M. A. (Alm.) (1982 – 1989)
4. Prof. Dr. H. Alfani Daud (1989 – 1995)
5. Prof. Drs. KH. M. Asywadie Syukur, Lc. (1995 – 2001)
6. Prof. DR. Kamrani Buseri, M. A. (2001 – 2009)
7. Prof. DR. H. Akh. Fauzi Aseri, M. A. (2009 – Sekarang)

BAB III

TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Ada lima dimensi pendidikan multikultural yang dikaji di IAIN Antasari Banjarmasin, yaitu pada ranah : Integrasi isi/materi dalam kurikulum; Konstruksi pengetahuan dalam perkuliahan maupun program kegiatan; Pengurangan prasangka dalam kultur kampus; Pendidikan yang sama/adil; Pemberdayaan budaya kampus dan struktur sosial. Adapun hasil penelitiannya data dilihat sebagai berikut:

Dalam hasil penelitian ditemukan data bahwa adanya peningkatan kualitas proses dan mutu layanan pendidikan serta pembelajaran yang diselenggarakan untuk menopang keberhasilan pencapaian administrasi dan keuangan serta kepuasan pemangku kepentingan. Peningkatan kualitas proses dan mutu pelayanan yang diselenggarakan IAIN Antasari Banjarmasin dalam konteks proses pendidikan dan pengembangannya juga mengacu pada indikator

keberhasilan dan pencapaian administrasi dan keuangan serta kepuasan *stakeholders*.

1. Etos dan Budaya Kerja (*Ethos and Culture*)

Perspektif keempat ini menggambarkan bagaimana IAIN Antasari Banjarmasin mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di dalamnya, sehingga mampu menopang keberhasilan pencapaian perspektif proses pendidikan dan pengembangan, administrasi, keuangan dan kepuasan pemangku kepentingan serta proses pendidikan dan pengembangannya.

Dari latar belakang keempat perspektif tersebut, IAIN Antasari Banjarmasin menetapkan visinya sebagai berikut: “Menjadikan IAIN sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner yang unggul, berakhlak dan kompetitif”.

Sedangkan misi Antasari Banjarmasin merupakan bagian dari visi yang dikembangkan ke dalam empat misi. Pengembangan tersebut dilakukan untuk mempermudah pengembangan lebih lanjut ke dalam bentuk tujuan, dan pencapaian sasaran serta pengukuran ketercapaian program yang dikembangkan. Misi IAIN Antasari Banjarmasin adalah:

1. Memberdayakan potensi untuk mengembangkan studi keislaman, keilmuan dan teknologi dalam pendidikan dan pengajaran;
2. Mengembangkan kualitas penelitian dan kajian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan peradaban;
3. *Meningkatkan keterlibatan lembaga dengan penuh amanah dalam pengabdian masyarakat berdasarkan wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat yang berperadaban; dan*
4. *Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi*

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi

IAIN Antasari Banjarmasin, maka ditetapkan lima

(5) tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan peran lembaga di tengah masyarakat;
2. Meningkatkan manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;

3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pelayanan yang berkelanjutan dan berorientasi mutu;
4. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pelayanan yang berkelanjutan dan berorientasi mutu; dan
5. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi dosen dan karyawan.

Sedangkan sasaran-sasaran yang akan dicapai

adalah:

Tujuan 1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan peran lembaga di tengah masyarakat;

- (1) Meningkatnya mahasiswa masuk ke IAIN Antasari Banjarmasin;
- (2) Meningkatnya mutu Kegiatan Belajar Mengajar
- (3) Meningkatnya jumlah alumni yang bekerja, berkarya dan berusaha di masyarakat;
- (4) Meningkatnya produktifitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- (5) Meningkatnya keterlibatan lembaga dalam peningkatan taraf hidup masyarakat

Tujuan 2. Meningkatkan manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;

- (6) Meningkatnya keterbukaan keuangan melalui informasi yang objektif

- (7) Meningkatnya fungsi sistem pengawasan keuangan;
- (8) Meningkatnya omset dan hasil unit usaha;
- (9) Meningkatnya pendapatan dari kemitraan dan kerjasama
- (10) Meningkatnya kesejahteraan dosen dan karyawan

Tujuan 3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pelayanan yang berkelanjutan dan berorientasi mutu

- (11) Meningkatnya mutu pelayanan bidang akademik dan non akademik
- (12) Meningkatnya keunggulan akademik dan daya saing lembaga;
- (13) Meningkatnya penyerapan kurikulum sesuai perkembangan dan kebutuhan akademik
- (14) Meningkatnya kualitas, prestasi lulusan dan selesai tepat waktu
- (15) Meningkatnya akses informasi pada alumni tentang lapangan kerja

Tujuan 5. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi dosen dan karyawan.

- (16) Meningkatnya kualitas kinerja dosen dan karyawan
- (17) Meningkatnya profesionalitas dan kompetensi dosen dan karyawan;
- (18) Membaiknya rasionalisasi dosen dengan mahasiswa setiap program studi

(19) Meningkatnya kepuasan pemangku kepetingan atas pelayanan dosen dan karyawan

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud,

maka kebijakan-kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kuantitas dan minat calon mahasiswa untuk mendapatkan mahasiswa yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan dan budaya akademik
3. Meningkatkan kualitas keterampilan, jiwa kepemimpinan dan kemandirian mahasiswa
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian berbasis *participatory action research (PAR)* dan publikasi hasil penelitian
5. Meningkatkan peran lembaga dengan kegiatan berbasis *Participation Action Research (PAR)* untuk kualitas hidup masyarakat
6. Mendorong sistem, transparansi dan pelaporan keuangan untuk memberikan informasi yang akurat
7. Membedayakan sistem pengawasan keuangan seluruh satuan pengawas
8. Memberikan otonomi kepada unit usaha dalam menggali potensi usaha

9. Memperluas kerjasama untuk meningkatkan pendapatan
10. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan
11. Meningkatkan pendayagunaan media untuk kualitas pendidikan
12. Meningkatkan keseimbangan muatan kurikulum antar program studi
13. Meningkatkan kualitas lulusan untuk pengabdian masyarakat
14. Mengoptimalkan seluruh media untuk terciptanya budaya akademik
15. Mengevaluasi secara berkala dalam penerapan pola penghargaan kepada dosen dan karyawan
16. Meningkatkan kompetensi dan kinerja dosen dan karyawan melalui mekanisme evaluasi persemester
17. Meningkatkan tersedianya fasilitas pendukung dalam penggunaan dan penguasaan teknologi informasi bagi dosen dan karyawan
18. Meningkatkan pelayanan yang berbasis teknologi dalam mendukung kualitas pelayanan

Adapun Program Dalam rangka tercapainya tujuan strategis sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, manajemen IAIN Antasari

Banjarmasin diwajibkan melakukan agenda aksi dalam bentuk program dan kegiatan:

1. Sosialisasi dan informasi akademik
2. Peningkatan mutu Pembelajaran
3. Pemberdayaan alumni
4. Peningkatan kualitas penelitian dan kuantitas paket penelitian
5. Peningkatan kualitas publikasi keilmuan dan kuantitas penerbitan
6. Peningkatan kualitas pengabdian dan kuantitas paket pengabdian
7. Peningkatan sistem pelaporan dan informasi keuangan
8. Peningkatan sistem dan profesionalitas supervisi
9. Peningkatan omset dan produktifitas unit usaha.
10. Perluasan jaringan kerjasama
11. Peningkatan kesejahteraan pegawai
12. Peningkatan mutu kurikulum dan penambahan koleksi perpustakaan
13. Peningkatan dan pemberdayaan fasilitas media pendidikan dan pengajaran
14. Sosialisasi kurikulum akademik pada seluruh prodi Peningkatan media

15. Pembelajaran dan kualitas lulusan
Mengoptimalkan fasilitas informasi

16. Peningkatan kinerja dosen dan karyawan
secara terpadu

17. Peningkatan kompetensi dan
profesionalitas dosen dan karyawan

18. Peningkatan kompetensi dan
profesionalitas dosen dan karyawan

19. Peningkatan kemampuan dan Penguasaan
Teknologi Informasi

20. Peningkatan sarana dan prasarana

Adapun kegiatan-kegiatan di IAIN Antasari
adalah:

1. Sosialisasi Program studi ke
sekolah/madrasah;
2. Pembinaan pesantren/ madrasah
berkelanjutan;
3. Penerimaan mahasiswa baru;
4. Evaluasi dan akreditasi mutu program studi;
5. Pengembangan sistem rekrutmen
mahasiswa baru;
6. Evaluasi kurikulum berbasis kompetensi;
7. Inovasi kurikulum;
8. Pengembangan silabus;
9. Menambah media pembelajaran;

10. Pelatihan metode mengajar berbasis Informasi teknologi;
11. Workshop/seminar/ lokakarya;
12. Pengembangan pedoman-pedoman akademik;
13. Studi lanjut dosen;
14. Gelar olah raga, seni dan cinta lingkungan mahasiswa;
15. Program penguasaan bahasa asing program strata 1, 2 dan 3;
16. Pembentukan dan pemberdayaan Ikatan alumni;
17. Pusat informasi alumni dan peluang kerja;
18. Pelatihan kepemimpinan dan jiwa wirausaha
19. Kecakapan hidup (*life skill*);
20. Workshop kemampuan meneliti;
21. Workshop penulisan karya tulis;
22. Penelitian individual;
23. Penelitian kolektif;
24. Pengembangan pusat-pusat penelitian;
25. Kerjasama penelitian;
26. Temu riset ilmiah;
27. Penerbitan karya ilmiah;
28. Penerbitan jurnal hasil penelitian;
29. Kuliah Kerja Nyata berbasis PAR;

30. Peningkatan Desa Binaan;
31. Kerjasama Pembinaan Keagamaan Komunitas Adat terpencil
32. Kerjasama Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama
33. Penerbitan petunjuk teknis akreditasi IAIN Antasari Banjarmasin
34. Penerbitan petunjuk teknis auditing
35. Pengembangan media informasi keuangan
36. Workshop dewan pengawas PK-BLU
37. Pembinaan profesionalitas tenaga pemeriksa keuangan;
38. Pembinaan manajemen dan administrasi usaha
39. Pedoman pengelolaan unit usaha
40. Kerjasama peningkatan omset usaha
41. Membuka kerjasama kelembagaan untuk peningkatan kualitas akademik
42. Memperpanjang kerjasama dengan lembaga mitra
43. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
44. Pembayaran honorarium, Lembur, vakasi, tunjangan Khusus dan hak pendapatan lainnya
45. Logistik dan operasional Kantor

46. Evaluasi dan inovasi kurikulum berbasis kompetensi
47. Penerbitan Diklat dan buku Daras perkuliahan;
48. Penambahan koleksi perpustakaan
49. Mengembangkan pendidikan ma'had al-Jamiah
50. Mengembangkan laboratorium bahasa
51. Pemberdayaan fungsi *training centre*
52. Pemberdayaan Pusat Kajian mahasiswa
53. Jaringan informasi dan internet
54. Inovasi dan aplikasi kurikulum
55. Orientasi kurikulum
56. Sosialisasi penyerapan kurikulum berbasis kompetensi
57. Konsultasi pimpinan/rapat kerja
58. Mengadakan buku panduan belajar
59. Akreditasi jurusan/prodi
60. Pelatihan strategi pembelajaran untuk penyerapan kurikulum
61. Menambah fasilitas jaringan bagi civitas akademika
62. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet untuk kepentingan akademik dan non akademik

63. Memantapkan sistem kinerja dosen dan karyawan
64. Melaksanakan sistem reward (penghargaan) kepada dosen dan karyawan
65. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan
66. Membangun sistem rekrutmen dosen dan karyawan
67. Peningkatan profesionalitas kompetensi dosen dan karyawan
68. Bimbingan teknis pemberdayaan media belajar mengajar dan pelayanan berbasis teknologi
69. Melengkapi media teknologi pembelajaran bagi dosen
70. Sistem informasi terpadu yang berbasis teknologi informasi
71. Pengembangan pusat teknologi informasi
72. Pengadaan Logistik
73. Pemeliharaan Pembangunan gedung kantor.

B. Pembahasan

Pendidikan Multikultural di IAIN Antasari Banjarmasin (Studi Analisis Kebijakan dan

Praxis), yang digali berdasarkan pendekatan pendidikan multikultural yang dikaji menggunakan pendekatan kontributif, aditif, transformatif, dan pendekatan aksi sosial. Pendekatan-pendekatan tersebut bermuara pada dimensi pendidikan multikultural baik dilihat dari kebijakan yang ada maupun praxis, yaitu dimensi: Integrasi isi/materi dalam kurikulum; Konstruksi pengetahuan dalam perkuliahan maupun program kegiatan; Pengurangan prasangka dalam kultur kampus; Pendidikan yang sama/adil; Pemberdayaan budaya kampus dan struktur sosial.

Berdasarkan paparan data yang disebutkan diatas dan kebijakan serta praxisnya, maka pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan yang berperspektif Qurani, hal ini dapat diketahui berdasarkan orientasi visi-nya yang juga menghasilkan output yang berakhlak (Akhlakul Karimah).

Kurikulum yang dibangun adalah kurikulum yang humanis. Meskipun eksklusifitas masih tampak dengan kegiatan masih berorientasi ke dalam namun ada beberapa kegiatan dan kerjasama yang terbuka. Maka tipologi yang tampak adalah *Ethnic identities clarification*;

IAIN Antasari telah berusaha untuk mengembangkan sikap yang positif terhadap budaya dan kultur di IAIN Antasari dan menunjukkan sikap menerima dan memberikan jawaban positif kepada Kultur lainnya. Hal ini adanya diselenggarakan beberapa kali seminar dan diskusi ilmiah dan kerjasama internasional yang mengarah pada tema-tema pluralitas (misal Islam Washshatiyyah) dan kebijakan tentang cadar bagi mahasiswa serta organisasi radikal yang penerimaannya positif. Humanis disini IAIN Antasari walaupun berbeda pandang keagamaan namun tetap menjunjung tinggi moralitas universal, mendorong terciptanya keadilan social dan menjaga kelestarian alam serta meminimalisir radikalisme agama. Eklusifitas tampak pada sumber utama berpegang pada sumber-sumber utama Islam.

Kurikulum yang ditetapkan berbasis pada kemajuan. Pengembangan keagamaan dan keilmuan dilihat dari paduan globalisme universalisme dan lokalisme partikularisme. Meskipun dalam faktanya pada ranah sosiologis keberagaman hanya tampak pada perbedaan kultur budaya daerah dan organisasi besar agama Islam, namun tidak ada pada ranah agama ataupun

diluar dari Islam (Non Islam). Penerimaan untuk yang berkebutuhan khusus diperlakukan sama, namun untuk fasilitas difabel belum tersedia secara optimal.

Kurikulum dan kebijakan yang dibuat diarahkan untuk mengembangkan sikap asertif, simpatik, memiliki keterampilan social, beretos kerja yang tinggi. Untuk seluruh civitas akademik dan mahasiswa diarahkan untuk memiliki elemen landasan kepribadian yang kompetitif, unggul dan berakhlak (Akhlakul Karimah), penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap perilaku dengan memiliki keahlian.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada temuan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk pendidikan multikultural yang ada di IAIN Antasari banjarmasin bersifat eksklusif humanis profetik, dan untuk tipologinya adalah *Ethnic identities clarification*; IAIN Antasari telah berusaha untuk mengembangkan sikap yang positif terhadap budaya dan kultur di IAIN Antasari dan menunjukkan sikap menerima dan memberikan jawaban positif kepada Kultur lainnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka tindak lanjut yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan multikultural akan tumbuh secara optimal jika dosen, mahasiswa dan seluruh sivitas akademik memiliki komitmen dan sinergitas yang tinggi dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran yang didasari pendekatan – pendekatan multicultural.
- b. Materi perkuliahan yang dipelajari harus berorientasi pada kontekstual sehingga

pembelajaran dan pengajaran terarah pada upaya memelihara mahasiswa menjadi skeptic yang sehat, yang secara constant mempertanyakan klaim – klaim yang sudah ada terhadap kebenaran dan akurasi sosial dan akademik dalam rangka mencari penjelasan baru, menentukan perspektif – perspektif, pengetahuan, dan pengalaman secara kultural pluralistik dari berbagai sudut pandang terwakili.

- c. Perlu adanya penelitian lebih lanjut berkenaan pengembangan lingkungan yang inklusif humanis profetik secara nyata di IAIN Antasari.
- d. IAIN Antasari bisa mengembangkan perkuliahan berbasis pendidikan multikultural dan menjadi distingsi dari kampus di Kalimantan selatan karena berkesuaian dengan model integrasi ilmu IAIN Antasari sungai pengetahuan yang mengarusutamakan integrasi dinamis, integrasi Islam dan kebangsaan, berbasis lokal, dan berwawasan global. Pendekatan – pendekatan multikultural mampu menjadi alternatif pendekatan yang bisa dimplementasikan dalam kegiatan perkuliahan.